

OGP Local Action Plan Template

Off-line fillable form for action plan commitments


This section is composed of a detailed description of the open government commitments. These commitments are the concrete short-term initiatives to achieve the medium-term outcomes identified in the Local Open Government Strategic Vision.

Below is a fillable template with the fields of information necessary to complete this section of the action plan. Please make sure you note the character limit for each textbox.

Please note that the final action plan will be submitted online through a platform provided by OGP Local.

1. Commitment Title

*Describe the specific action that the commitment will achieve, distinguishing commitment from other commitments in the plan. Example:
"Create beneficial ownership register" or "Publish judicial data" or "Improve compliance with RTI law"*



Maximum 250 characters

Meningkatkan kesehatan masyarakat dan ketahanan keluarga melalui Revitalisasi Posyandu

2. Timeframe

Commitment Start Date (month/year)

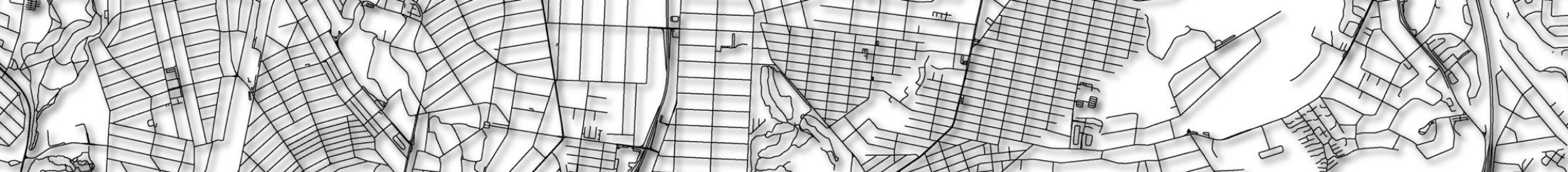
Agustus 2021

Commitment End Date (month/year)

December 2023

3. Lead implementing government agency

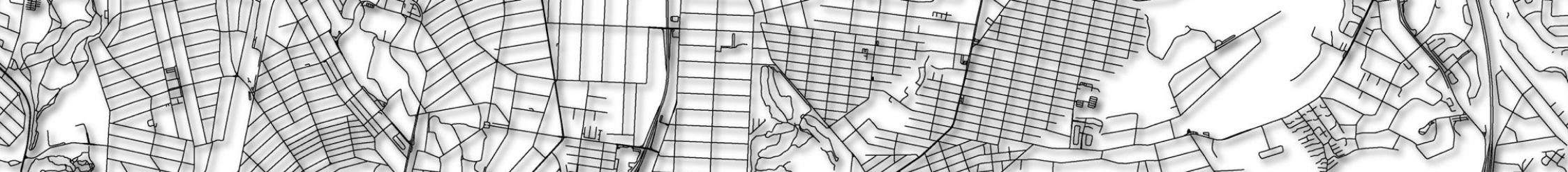
Office, Agency or Ministry	Branch of Government (Select from the following: Executive branch; Judicial branch; Legislative branch; Independent/Autonomous)	Name of Contact	Title	Email	Role in Implementation (Select from the following: Lead; support; oversight; coordinate)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dr. H. Ashari, SH. MH	Kepala Dinas	ntbdpmpd@gmail.com	Ketua



Pencatatan Sipil					
Add lines as necessary					

4. Lead implementing non-governmental stakeholder, if applicable

Name of organization	Name of Contact	Title	Email	Role in Implementation (Select from the following: Lead; support; oversight; coordinate)
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Hj.Niken Zulkiefliemansyah	Ketua TP-PKK		support
Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB	Haris	Direktur		support
Global Fund	Yatiek	Leader		support
Pendamping Program Pengembangan dan	Tauhid	Koordinator Provinsi		support




Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)				
Add lines as necessary				

5. Other Stakeholders Involved in the implementation of this commitment

(e.g. Government Ministries, Departments, Agencies, Civil Society Organizations, Community Groups, Private Sector, or Working Groups)

Name of organization	Name of Contact	Title	Email	Role in Implementation (Select from the following: Lead; support; oversight; coordinate)
Dinas Kesehatan	dr.H.Lalu Hamzi Fikri, MM.,MARS	Kepala Dinas		coordinate
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Iswandi	Kepala Badan		coordinate
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Madani Mukaram	Kepala Dinas		coordinate
Dinas Ketahanan Pangan	Drs. H. Fathul Gani, MSi	Kepala Dinas		coordinate
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM	Kepala Dinas		coordinate



Dinas Kominfotik	Drs. Najamudin, M.Si	Kepala Dinas		support
Dinas Sosial	Drs. Ahsanul Khalik	Kepala Dinas		coordinate
Add lines as necessary				

Commitment Description

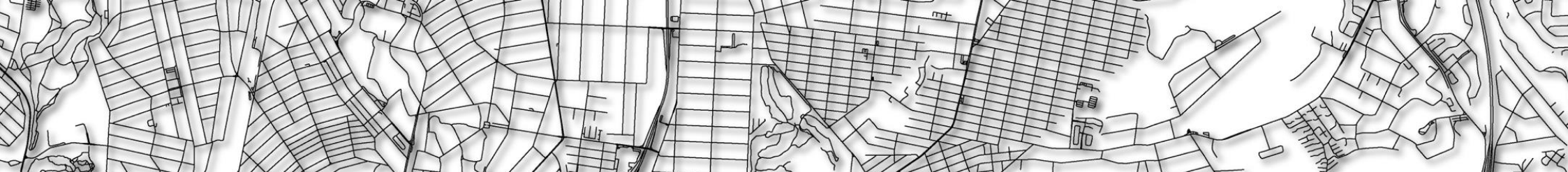
6. Problem

Describe the economic, social, political, or environmental problem identified that this commitment seeks to resolve. (e.g. 'Misallocation of welfare funds' is more helpful than 'lacking a website'.)

Maximum 1000 characters

- Regulasi Posyandu Keluarga mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa belum tersedia.
- Kualitas dan kuantitas Kader masih belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena belum semua kader mendapatkan pelatihan, sering terjadi pergantian kader, jumlah kader yang masih kurang dan insetif kader masih belum memadai.
- Sarana Prasarana Posyandu yang masih terbatas seperti Timbangan/Dacin, Antropometri kit, Posbindu Kit, Lansia Kit, Remaja Kit, Tempat Tidur, Tenda Pelayanan, Meja Kursi.
- Aplikasi Sistim Informasi Posyandu belum diimplementasikan secara optimal karena :
 - a. Belum semua desa mendapatkan pelatihan Sistim Informasi Posyandu
 - b. Belum semua petugas operator memiliki SK Kepala Desa/ Lurah.
 - c. Dukungan tenaga kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan SIP
- Dukungan operasional penyelenggaraan Posyandu Keluarga masih kurang seperti Pemberian Makanan Tambahan, Pelatihan Kader, Kelas Stunting, Kelas Ibu Hamil, Tes Diagnostik

7. Status quo



Describe the current state of the policy issue at the beginning of an action plan. (e.g.: 26% of judicial corruption complaints are not processed currently.)

Maximum 1000 characters

- a. Telah adanya draft Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Posyandu
- b. Advokasi kepada pemerintah desa untuk menyusun Peraturan Desa tentang Posyandu Keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan turunannya
- c. Sosialisasi Kelembagaan Pokja Posyandu di 10 Kabupaten
- d. Bimtek Penguatan Kapasitas Pokja Posyandu bagi 526 desa
- e. Pelatihan operator Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) di 10 kabupaten/ Kota se NTB
- f. Training of trainer Posyandu keluarga bagi petugas kabupaten dan petugas Puskesmas khusus di Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Barat
- g. Pengadaan Alat Antropometri Kit
- h. Sertifikasi bagi kader Posyandu
- i. Advokasi Pemerintah Desa dan Kabupaten terkait pemanfaatan Dana Desa untuk Posyandu Keluarga
- j. Pengembangan Questing and Answer Posyandu Keluarga melalui Medsos
- k. Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Posyandu berbasis Website
- l. Melaksanakan Webinar Posyandu keluarga bagi stakeholder tingkat Kabupaten, Kecamatan, Puskesmas dan Desa

8. Action

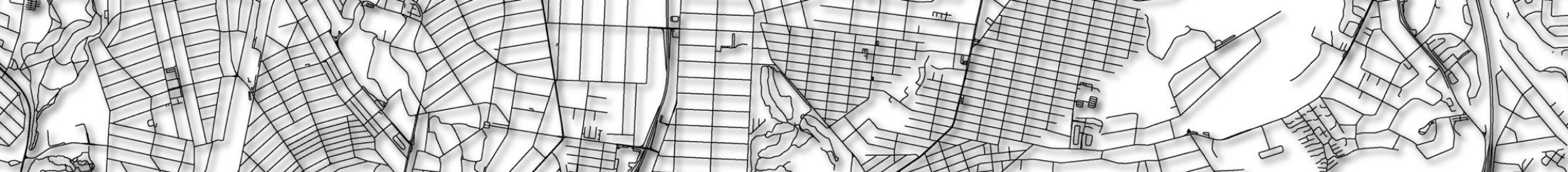
What is the commitment? Describe what the commitment entails, its expected results, and overall objective.

Maximum 1000 characters

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan ketahanan keluarga melalui peningkatan kapasitas Posyandu menjadi Posyandu Keluarga yang menyediakan layanan kesehatan yang lebih beragam dan diintegrasikan dengan layanan desa lainnya serta didukung oleh sistem informasi posyandu sebagai media informasi, edukasi dan pengelolaan data kesehatan masyarakat desa.

9. How will the commitment contribute to solving the public problem?

What are the expected outputs and outcomes once the commitment has been implemented?



Maximum 1000 characters

Melalui Revitalisasi Posyandu Keluarga diharapkan Kelembagaan Posyandu dapat tertata dengan baik, tersedianya Sumber Daya Manusia (kader Posyandu) yang berkualitas, sarana Prasarana Posyandu terpenuhi, pendataan dan pelaporan Posyandu dapat dilaksanakan, terpenuhinya operasional Posyandu dan terlaksananya Konvergensi kegiatan social kemasyarakatan lainnya

10.What long-term goal as identified in your Open Government Strategic Vision does this commitment relate to?

Maximum 1000 characters

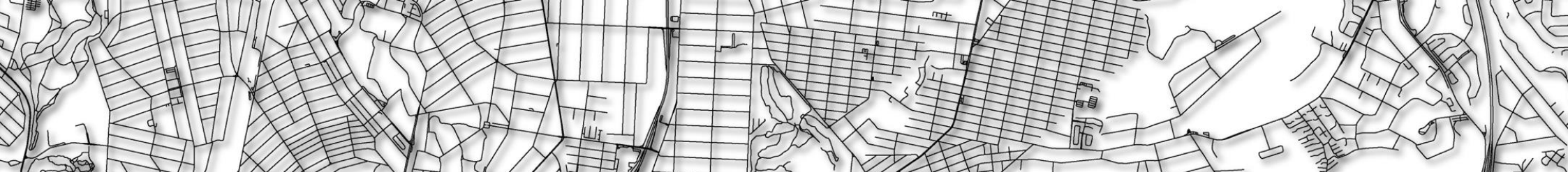
Komitmen ini mendukung pencapaian misi pembangunan Provinsi NTB, yaitu misi kedua NTB Bersih dan Melayani, serta Misi ketiga NTB sehat dan Cerdas. Melalui Revitalisasi Posyandu akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat desa, sehingga kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat dan ketahanan keluarga semakin kuat.

11.Primary Policy Area

Please indicate the most relevant policy or practice for this commitment. Select up to two policy areas from the following list: Asset Disclosure; Audits & Controls; Beneficial Ownership; Civic Space; Conflict of Interest; Crisis Response; Digital Governance; E-petitions; Elections &; Political Finance; Fiscal Openness; Inclusion; Legislative Openness; Lobbying; Open Contracting; Open Data; Public Procurement; Regulatory; Governance; Right to Information; Safety Nets & Economic Inclusion; Safety Nets and Economic Inclusion; Social Accountability; Stimulus and Economic Recovery; Tax; Whistleblower Protection; Other/NA

Digital Governance

Inclusion



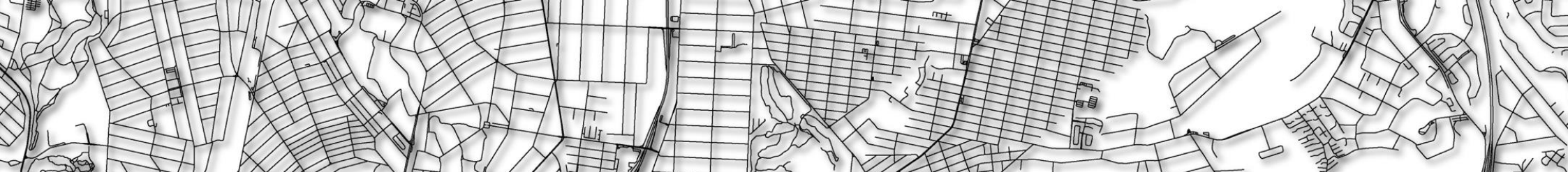
12. Primary Sector

Please indicate the most relevant primary sector for this commitment. Select up to two sectors from the following list: Aid; Citizenship & Immigration; Cross-sectoral; Education; Environment & Climate; Extractive Industries; Health & Nutrition; Infrastructure & Transport; Justice; Land & Spatial Planning; Legislature; Media and Telecommunications; Policing & Corrections; Private Sector; Public Services (general); Science & Technology; Security and Public Safety; Water, Sanitation, and Hygiene; Other/NA

Health and Nutritions
Public Services

13. What OGP value is this commitment relevant to?

Select Value <i>from the following list:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Transparency - Public Participation and Inclusion - Public Accountability - Technology/innovation for transparency - Technology/innovation for public participation - Technology/innovation for accountability 	Why is this commitment relevant to this value?
Public Participation and Inclusion	Program revitalisasi posyandu akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan di tingkat desa
Technology/innovation for public participation	Sistem informasi posyandu didukung aplikasi online berbasis web yang digunakan untuk mengelola data kesehatan masyarakat desa dan media desiminasi dan edukasi kepada masyarakat.
Add lines above as necessary	



14. What resources are needed to achieve this commitment?

Please include budget, staff, time, and contributions of civil society and other organizations and any other resources required.

Budget <i>(estimated budget allocation and specify currency)</i>	Staff <i>(number of staff required to implement the commitment)</i>	Time <i>(months needed to implement the commitment)</i>	Other resources required <i>(please describe)</i>
5,466,000,000	61784 orang	36 months	Penguatan Kapasitas SDM , penguatan kapasitas petugas operator SIP, sertifikasi kader, operasional Posyandu, dan pelaporan
Add lines above as necessary			

15. Are the resources needed to achieve this commitment already secured?

Please select one option: Yes / No / Partially

Partially

16. Additional Information [Optional]

Use this optional space to provide other useful information, for example:



- *Links to other government programs*
- *Links to the national development plan or other sectoral or local plans*
- *Link to the Sustainable Development Goals*
- *Gender perspective analysis*

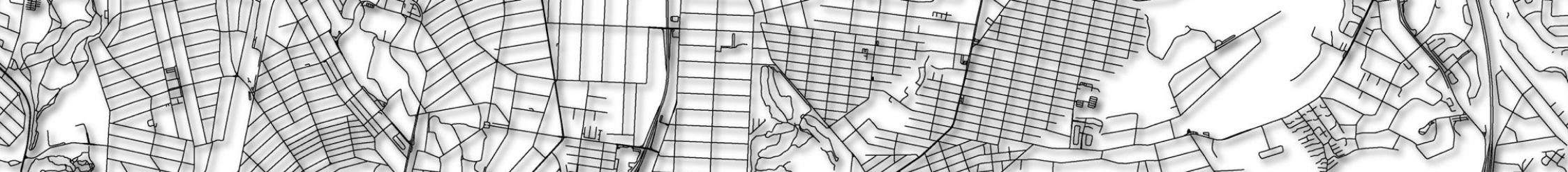
Maximum 1000 characters

- Revitalisasi Posyandu sebagai salah satu program yang diprioritaskan di Provinsi NTB sejak tahun 2018. Program ini dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan ketahanan keluarga.
- Telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MOU) Antara Pemprov NTB dan 10 Pemkab/Kota yang ditandatangani Gubernur dan Bupati/ Walikota tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste, Revitalisasi Posyandu, Pengembangan Desa Wisata, Penanggulangan Kemiskinan dan Mitigasi Bencana

17. Milestones

Please add below the individual milestones of your commitment. Add one line per milestone. You can add as many lines as necessary.

Describe the output	Start date (MM/YYYY)	End Date (MM/YYYY)	Responsible Agency	Contact person	Status <i>Select from the following: Not started; in progress, stuck finished; incomplete.</i>
Penyusunan regulasi Posyandu di Tingkat Provinsi	Agustus 2021	September 2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agung Pramuja, S.Adm Kepala Bidang kelembagaan dan Sosial Budaya DPMPD DUKCAPIL Prov. NTB	In Progress
Workshop Indikator Posyandu Keluarga (1 x setahun)	Agustus 2021	Dec 2023	Dinas Kesehatan	Muhammad Johansyah	
Advokasi Penyusunan Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Posyandu Keluarga di Kabupaten/kota (8 x setahun)	Agustus 2021	Dec 2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agung Pramuja, S.Adm	



Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (10 x setahun)	Agustus 2021	Dec 2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Agung Pramuja, S.Adm Kepala Bidang kelembagaan dan Sosial Budaya DPMPD DUKCAPIL Prov. NTB	In Progress
Monitoring dan evaluasi (10 x setahun)	Agustus 2021	Dec 2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agung Pramuja, S.Adm Kepala Bidang kelembagaan dan Sosial Budaya DPMPD DUKCAPIL Prov. NTB	In Progress
Add lines above as necessary					
